

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat kesopanan dan ramah tamah yang tinggi, namun dibalik itu masih terdapat berbagai perilaku amoral yang dilakukan oleh penduduknya, terutama kaum remaja lebih khususnya pelajar Indonesia (Yoni, 2018). Peristiwa karakter anak Indonesia yang kian menyimpang menjadi perhatian bagi pemerhati Pendidikan. Kasus mengenai pendidikan karakter di Indonesia masih banyak terjadi. KPAI telah menangani 1885 kasus pada semester pertama tahun 2018. Tercatat 504 anak jadi pelaku pidana, dari mulai pelaku narkoba, mencuri, hingga kasus asusila menjadi kasus yang paling banyak (Detik.com, 2018).

Dalam kasus anak bermasalah dengan hukum (ABH), Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) mencatat sebanyak 23,9 persen anak masuk penjara karena mencuri, kasus narkoba sebanyak 17,8 persen, serta kasus asusila sebanyak 13,2 persen. Disamping itu, berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak, tercatat 62,7 persen remaja SMP di Indonesia sudah tidak perawan. Terdapat pula hasil lainnya seperti tercatat 93,7 persen peserta didik SMP dan SMA pernah berciuman, 21,2 persen remaja SMP mengaku pernah melakukan aborsi, dan 97 persen remaja SMP dan SMA pernah melihat film porno. (Kompas.com, 2018)

Data survei yang dikeluarkan oleh Program for International Student Assessment (PISA), Kualitas pelajar Indonesia menempati urutan 72 dari 77 negara (Ita, 2019). Data ini menunjukkan bahwa Pelajar Indonesia secara keseluruhan berada pada urutan ke enam terbawah, peringkat ini pula membawa Indonesia jauh ketinggalan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam (Rahmad, 2019).

Perilaku amoral di kalangan pelajar terus terjadi bahkan tidak hanya satu jenis saja, menurut catatan liputan6.com bentuk-bentuk perilaku degradasi moral di kalangan pelajar diantaranya berupa hilangnya sopan santun kepada guru, tawuran

antar pelajar, bullying, narkoba, hingga pornografi. Degradasi moral pelajar Indonesia kian memburuk betapa tidak, menurut data dari Gangguan Sosial DKI Jakarta mengungkapkan bahwa 1.318 pelajar dari total 1.647.835 siswa di Jakarta pernah melakukan aksi tawuran. (Muslihuddin, 2018).

Aksi tawuran pelajar tersebut tidak tanggung-tanggung sampai memakan korban. Seperti yang diberitakan media merdeka.com pada tahun 2017, satu pelajar Yogyakarta menjadi korban pembacokan. Setelah diusut oleh kepolisian, pelajar tersebut terlibat aksi pembacokan yang dilakukan antar pelajar. (Purnomo, 2017).

Deretan kasus degradasi moral pelajar Indonesia yang telah disebutkan diatas bila mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau SISDIKNAS tahun 2003 sangat bertolak belakang. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pasal 3 disebutkan bahwa Pendidikan Nasional hendaknya mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia. Hal ini kemudian dapat diartikan bahwa pendidikan tidak hanya membentuk manusia yang cerdas semata, lebih dari itu Pendidikan diharapkan dapat membentuk akhlak mulia pada siswa, oleh karenanya, bekal akhlak mulia dapat menjadi dasar bagi siswa dengan harapan nantinya lahir sebagai generasi bangsa yang mengaplikasikan nilai-nilai luhur bangsa dan agama.

Sejalan dengan sistem Pendidikan Indonesia yang berlaku saat ini, tokoh Pendidikan nasional bangsa Indonesia dan juga aktivis, Ki Hadjar Dewantara telah mengupayakan Pendidikan di sekolah sebagai wadah atau tempat untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada siswa agar terbentuk budi pekerti yang mencerminkan kemanusiaan (Bartolomeus, 2016). Konsep Pendidikan yang dibawa oleh Ki Hadjar Dewantara tujuannya agar memerdekakan dua aspek peserta didik yaitu *lahiriah* dan *batiniah*. Kedua aspek ini selalu melekat pada diri manusia yang berimplikasi pada cara menjalankan kehidupan.

Selaras dengan konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara diatas, pendidikan moral menurut KH. Ahmad Dahlan menjadi sangat penting karena lewat Pendidikan ada potensi besar untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta

didik, yang demikian ini telah dilakukan oleh KH. Ahmad Dahlan semasa hidupnya (Marzuki, 2018). Sudah seharusnya pendidikan dan pembentukan akhlak ditanamkan saat anak usia dini. Sekolah memang bisa menjadi wadah untuk pembentukan akhlak, Pendidikan moral di sekolah mendapat porsi yang besar sehingga besar harapan orang tua agar putra putrinya mendapat didikan yang terbaik dari sekolah.

Perilaku menyimpang yang tidak bermoral seperti yang sudah dipaparkan, hendaknya tidak bisa dibiarkan tanpa ada upaya preventif dari lembaga yang secara langsung menjadi tanggung jawabnya, dalam hal ini adalah lembaga Pendidikan yaitu sekolah-sekolah. Apa jadinya bila peserta didik Indonesia yang dicita-citakan sebagai generasi penerus bangsa kehilangan moral pemudanya, yang seperti ini akan berdampak pada *lost generation* (Sinunligga, 2016). Jika moral pemuda rusak lalu bagaimana nasib bangsa di kemudian hari.

Beruntungnya bangsa Indonesia dalam mengupayakan perbaikan moral pemuda bangsa, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KEMENDIKBUD RISTEK) telah mengeluarkan program penguatan karakter yang dinamakan Profil Pelajar Pancasila. Program ini kemudian dikeluarkan sebagai peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2021 (kemendikbud.go.id). Lembaga pendidikan di seluruh Indonesia sebagai *end-user* tentunya diwajibkan untuk mengimplementasikan program ini dengan sebaik mungkin. (Puspita, 2020)

Secara umum Profil pelajar Pancasila memiliki enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif, seperti dikutip dari laman Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Point nomor satu dalam urutan profil pelajar pancasila disebutkan “Beriman, Bertakwa kepada tuhan YME, dan Berakhlak mulia” (kemdikbud.go.id). Menurut hemat peneliti, pembentukan akhlak yang dipercayakan orang tua kepada lembaga Pendidikan, disinilah peran guru sebagai *frontline* pendidik dalam peningkatan karakter dan peningkatan mutu Pendidikan diperlukan.

Peran guru seakan tidak bisa dipisahkan dalam pembentukan karakter siswa di lingkungan sekolah, bukan tugas yang mudah di era globalisasi sekarang ini harus berhadapan dengan kemajuan teknologi dan kecanggihan sarana informasi, perkembangan dan pengaruhnya tidak saja membawa dampak positif bagi peserta didik namun dampak negatif juga bisa saja terjadi. (Khasanah, n.d.) Hal ini kemudian peneliti tergerak untuk melakukan penelitian dengan mengukur Efektivitas komunikasi interpersonal guru dalam membentuk profil pertama pelajar Pancasila di SMP Muhammadiyah Limbung.

Kajian tersebut penulis lakukan dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut; *Pertama*, guru adalah poros utama pembentukan dan peningkatan akhlak peserta didik di lingkungan sekolah, keberadaan sosok guru tidak dapat digantikan. Peran dan tanggung jawab guru dalam pembentukan karakter siswa menjadi tugas mulia. Tidak hanya dituntut menjaga nama baik instansi lembaga pendidikan, setiap guru juga dituntut agar dapat menciptakan suasana kelas yang nyaman, dinamis dan kreatif. (Khasanah dkk, 2019). Hal ini kemudian menjadi alasan, bahwa guru dengan segala tanggung jawab yang diberikan kepadanya layak untuk dihormati.

Kemampuan komunikasi interpersonal guru memiliki peran penting dalam membentuk moral peserta didik, diperlukan keterampilan mengajar guru yang efektif agar dalam menyampaikan nilai-nilai moral Pancasila dapat menarik minat peserta didik serta keterlibatan dalam proses belajar mengajar. (Mufidah & Asmawi, 2017), yang demikian ini efektivitas komunikasi interpersonal guru memiliki hubungan erat dengan pembentukan karakter peserta didik.

Kedua, profil pertama pelajar pancasila menjadi jiwa bagi profil pelajar pancasila lainnya. Hal ini sesuai dengan UU Sisdiknas N0. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, “Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (UUP No.20/2003).

Ketiga, SMP Muhammadiyah Limbung masih ditemukan Sebagian capaian perilaku siswa memiliki fenomena yang kontradiktif. Di satu sisi visinya, Terbentuknya Insan Beriman, Berilmu, Kreatif, Berdaya saing dan Berakhlak Mulia serta Peduli Lingkungan. Namun, di lapangan ditemukan Sebagian siswa memiliki sikap yang bertolak belakang dengan profil pertama pelajar pancasila.

Berdasarkan studi pendahuluan di lapangan, pada SMP Muhammadiyah Limbung masih ditemukan fenomena perilaku menyimpang yang kontra dengan profil pertama pelajar Pancasila, diantaranya kurangnya rasa hormat kepada guru, berkata kasar, terlibat kekerasan sesama teman, bullying, tidak disiplin dalam lingkungan sekolah, (Nurjayani, 2015). Sudah menjadi tanggung jawab guru untuk memberikan pemahaman akan pentingnya akhlak mulia dalam diri siswa. Persoalan moral siswa merupakan persoalan besar hingga kini masih menjadi tugas mulia guru (Sumarina, 2013).

Itulah sebabnya, efektivitas komunikasi interpersonal guru dalam pembentukan profil pertama pelajar Pancasila menjadi lebih evaluatif bila dilakukan di SMP Muhammadiyah Limbung. Secara teoritis, penelitian ini berimplikasi pada penguatan karakter siswa SMP Muhammadiyah Limbung, adapun secara praktis, sebagai sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi pendidik khususnya guru.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Tujuan Pendidikan nasional yang ingin dicapai di Indonesia berbanding terbalik dengan capaian nilai kualitas anak muda, khususnya dari sisi akhlak.
2. Untuk mencapai tujuan Pendidikan nasional dan profil pertama pelajar Pancasila, guru sebagai poros Pendidikan perlu memiliki komunikasi interpersonal yang efektif.
3. Sekolah berbasis keagamaan idealnya dapat mendorong terbentuknya profil pertama pelajar Pancasila.

4. Sebagai sekolah tingkat menengah pertama berbasis keagamaan, SMP Muhammadiyah Limbung memiliki fenomena yang kontradiktif antara visi misi dengan capaian perilaku sebagian siswa.
5. Oleh karena itu diperlukan kajian evaluatif terkait efektivitas komunikasi interpersonal guru dalam membentuk profil pertama pelajar Pancasila.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pembentukan profil pertama pelajar Pancasila di SMP Muhammadiyah Limbung
2. Bagaimana efektivitas komunikasi interpersonal guru dalam membentuk profil pertama pelajar Pancasila di SMP Muhammadiyah Limbung?

1.4 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan profil pertama pelajar Pancasila di SMP Muhammadiyah Limbung.
2. Untuk memetakan efektivitas komunikasi interpersonal yang dilakukan guru SMP Muhammadiyah Limbung dalam pembentukan profil pertama pelajar Pancasila.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan bermanfaat dalam memetakan model efektivitas komunikasi interpersonal guru terhadap perilaku pelajar yang kontra dengan profil pelajar pancasila khususnya pada sekolah berbasis agama.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Diharapkan sebagai sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi pendidik khususnya guru di SMP Muhammadiyah Limbung dalam menjalankan tugas mulia, membentuk profil pertama pelajar Pancasila.
2. Diharapkan dapat menjadi pertimbangan KEMENDIKBUD RISTEK dalam merumuskan kebijakan Pendidikan.

1.6 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup dalam Penelitian ini yaitu mengkaji proses pembentukan profil pertama pelajar Pancasila pada SMP Muhammadiyah Limbung. setelah itu peneliti akan mengkaji bagaimana proses komunikasi interpersonal pada elemen-elemen kunci profil pertama pelajar Pancasila untuk mengukur efektivitas komunikasi interpersonal tersebut. Kemudian pada tahap akhir peneliti akan mengelaborasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi interpersonal pada guru.